

RINGKASAN

Lidya Angelina Simanungkalit
NIM 210510044

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT
ILEGAL DI JAMBI (Studi Putusan No
9/Pid.Sus/2020/PN Srl)**

**Romi Asmara, S.H., M.Hum Dan Johari,
S.H., M.H**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia yang berdampak serius terhadap keselamatan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan kesehatan nasional. Meskipun ketentuan larangan dan sanksi pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kenyataannya masih banyak pelaku yang memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin edar dengan hukuman yang relatif ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang kesehatan belum berjalan efektif untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis yuridis terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal khususnya dalam putusan nomor 9/pid.sus/2020pn srl sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat ilegal sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 9/pid.sus/2020/pn srl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, serta putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan unsur Pasal 197 UU Kesehatan secara tepat secara yuridis formal, namun putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena sanksi pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Dan pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal daripada aspek keadilan sosial dan efek jera.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menyarankan agar hakim lebih mengedepankan analisis risiko kesehatan dan perlindungan masyarakat dalam perkara sejenis. Pemerintah dan BPOM juga perlu memperkuat pengawasan, edukasi, dan koordinasi dengan aparat hukum untuk mencegah maraknya obat ilegal. Dengan pendekatan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan berorientasi pada keselamatan publik, perlindungan masyarakat terhadap bahaya obat tanpa izin edar dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan hukum, obat ilegal, pertimbangan hakim

SUMMARY

Lidya Angelina Simanungkalit
NIM 210510044

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE
CRIME OF ILLEGAL DRUG
TRAFFICKING IN JAMBI (Study of
Decision No. 9/Pid.Sus/2020/PN Srl)**
**Romi Asmara, S.H., M.Hum And Johari,
S.H., M.H**

This research is motivated by the rampant circulation of illegal drugs in Indonesia which has a serious impact on public safety and lowers trust in the national legal and health system. Although the provisions of prohibition and criminal sanctions have been expressly regulated in Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, the reality is that there are still many perpetrators who produce and distribute drugs without a distribution permit with relatively light penalties. This condition shows that law enforcement in the health sector has not been effective in achieving the goals of justice, certainty, and legal benefits.

The purpose of this study is to analyze juridically against the criminal act of illegal drug trafficking, especially in decision number 9/pid.sus/2020pn srl to the extent that the decision reflects substantive justice and legal protection for the community. This study also aims to analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of illegal drug trafficking as stated in decision number 9/pid.sus/2020/pn srl. The research method used is normative juridical with a case approach. Research data was obtained through primary and secondary legal materials, including laws and regulations, scientific journals, legal literature, and court decisions.

The results of the study show that the judge has applied the elements of Article 197 of the Health Law appropriately in a formal juridical manner, but the verdict handed down does not fully reflect substantive justice, because the criminal sanction of eight months in prison and a fine of ten million rupiah is considered too light compared to the social impact caused. And the judge's consideration focuses more on formal legal certainty than on the aspects of social justice and deterrent.

Based on this analysis, this study suggests that judges prioritize health risk analysis and community protection in similar cases. The government and BPOM also need to strengthen supervision, education, and coordination with law enforcement to prevent the rise of illegal drugs. With a firmer, consistent, and public safety-oriented legal approach, public protection against the dangers of drugs without a distribution permit can be realized more effectively.

Keywords: Law enforcement, illegal drugs, judicial consideration